



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,
KAPALA KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (BPPI)**

Tahun Sidang	: 2023-2024
Masa Persidangan	: V
Rapat ke-	: --
Jenis Rapat	: Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Selasa, 11 Juni 2024
Waktu Rapat	: Pukul 10.18 s.d. 12.33 WIB.
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI / KK.III Gedung Nusantara I DPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M (Wakil Ketua/F-PPP)
Acara Rapat	: Pembicaraan Pendahuluan Pembahasan RAPBN TA 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 sampai dengan bulan Mei tahun 2024
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 24 dari 49 orang Anggota dengan rincian: A. ANGGOTA DPR RI PIMPINAN: 1. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP. (Wakil Ketua/F-PDIP) 2. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua/F-PPP) 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN 6 orang Anggota dari 11 Anggota: 1. Ir. H. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc. 2. Riyanta

3. H. Heru Sudjatmoko
 4. Drs Cornelis, M.H.
 5. Ir. Hugua
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
 2. Drs. H. Riswan Tony D. K.
 3. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M. H., M. Kn.
3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
2 orang Anggota dari 7 Anggota:
 1. H. Rahmat Muhajirin, S.H.
 2. Drs. Difriadi
4. FRAKSI PARTAI NASDEM
3 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Aminurokhman, S.E., M.M.
 2. Dr. Ujang Iskandar, S.T., M.Si.
 3. Kamran Mochtar Podomi, S.T.
5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
 2. Qumi Husnuyati, S.Aq., M.A.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
4 orang Anggota dari 5 Anggota:
 1. Reza Oktoberia, S.H.
 2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.
 3. H. Zulkifli Anwar
 4. H. Mohammad Muraz, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
0 orang Anggota dari 4 Anggota:
-
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
 1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
 2. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
2 orang Anggota dari 2 anggota:
 1. Dra. Hj. Munawaroh

Anggota yang Izin/Sakit:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si. (F-PG)

2. Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng. (F-PKS)

B. UNDANGAN

1. Kementerian Sekretaris Negara
(Drs. Setya Utama, M.Si./Sekretaris)
2. Sekretaris Kabinet
(Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.)
3. Kepala Staf Kepresidenan
(Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P.,
M.A.)
4. Kepala Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (BPIP)
(Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A.,
Ph.D.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Sekretaris Kabinet dan seluruh jajaran,

Pada hari ini hadir sama kita.

**Yang kami hormati Kepala Kantor Staf Presiden beserta jajaran Pak Jenderal Moeldoko, dan
Yang kami hormati Bapak Profesor Yudian Wahyudi sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan seluruh jajaran yang hadir, dan
Yang mewakili Menteri Sekretaris Negara,**

Ada yang hadir mewakili? Oh, ya. Kebetulan Bapak Menterinya tadi memberikan informasi beliau mohon berkenan tidak dapat hadir.

**Bapak/Ibu yang kami hormati, tentu yang berbahagia
Seluruh Anggota Komisi II yang sempat hadir saat ini, dan
Hadirin-hadirat yang berbahagia,**

Pertama-tama, tentunya kami mengajak kepada kita sekalian untuk menyampaikan puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. *Alhamdulillah*, kita semua berada dalam keadaan sehat *walafiat*.

Dan kepada kita sekalian, khususnya yang umat muslim dan muslimah, saya ajak untuk menyampaikan ucapan selawat dan salam untuk junjungan

nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan *allahuma shalli ala muhammad wa ala alihi washahbihi ajmain*.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dari daftar hadir yang ada, kita sudah dapat memulai pertemuan kita pada hari ini karena sudah mewakili semua fraksi yang ada di Komisi II pada hari ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Tanpa terasa kita sudah harus membahas rencana anggaran untuk tahun 2025. Artinya, waktu memang berjalan begitu cepat dan kita mesti kejar waktu itu dengan kecepatan gerak langkah kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun negeri yang kita cintai ini, Indonesia Merdeka. Semoga Allah SWT meridai kita semua.

Namun sebelum itu,

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Pada hari ini, tanggal 11 Juni tahun 2024, kita perlu menyampaikan selamat ulang tahun kepada rekan kita, kerabat kita, Bapak Menteri kita, Bapak Pramono Anung. Tentunya yang tak boleh kita sebutkan ulang tahun yang ke berapa ya, bisa lihat di *Google*. Oh, iya. Bisa dilihat di *Google*. Tapi, ini memang sangat tidak etis kalau kita sebutkan di tengah rapat ini. Tapi, yang penting kita doakan semoga beliau selalu sehat dan sukses menjalankan tugas-tugas kenegaraannya.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Kita sepakati pada hari ini, kita akan selesaikan. Karena kita tidak banyak membicarakan apa-apa, karena ini adalah rapat-rapat permulaan anggaran yang akan kita bahas pada waktu yang akan datang untuk tahun 2025 ini. Kita bahas kita dengarkan saja penyampaian dari masing-masing Kementerian dan BPIP, tentunya. Nanti kita akan bahas dan akan kita dalam pada pertemuan yang akan datang.

Namun, nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita sampaikan pada hari ini, bisa kita sampaikan. Namun kita sepakati nanti akan kita selesaikan dengan jawaban tertulis dari masing-masing kita. *Insyallah*, mudah-mudahan sesudah ini kita akan juga, juga ada rapat anggaran dengan beberapa kementerian lainnya. Jadi, ini mohon dimaklumi kita agak sedikit maraton dan mengejar waktu.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Oleh karena itu kami mengusulkan pertemuan ini untuk sementara kita akan cukupkan sampai pukul 11.15 menit. Setuju? Ya.

(RAPAT : SETUJU)

Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kita mulai pertemuan hari ini.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.18 WIB)

Dan kami persilakan kepada yang berulang tahun untuk menyampaikan penjelasannya. Dari Kementerian Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, kami persilakan Pak Pramono.

SEKRETARIS KABINET (Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang saya hormati Ketua Rapat,
Ketua sidang Bapak Syamsurizal,
Seluruh Anggota yang saya hormati,**

Mudah-mudahan hari ini, pagi hari ini, kita bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita sepakati bersama.

Sesuai dengan Surat Undangan Wakil Ketua DPR RI, maka hari ini kita akan membahas tiga hal yang berkaitan dengan:

- evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2023;
- evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2024; dan juga
- pembahasan mengenai pendahuluan RAPBN tahun 2025 dan rencana kerja pemerintah tahun 2025.

Ketua Rapat yang kami hormati,

Saya akan memulai yang pertama, sebelum menjelaskan hal yang berkaitan dengan tahun 2025, yaitu anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2023. Pagu Sekretariat Kabinet tahun 2023 adalah sebesar 356 miliar 600 dan seterusnya. Dan *alhamdulillah*, sampai dengan berakhirnya pagu itu dilaksanakan, maka program dukungan manajemen maupun program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, realisasi APBNP Sekretariat Kabinet tahun 2023 kurang lebih 98,38%, yaitu:

- 98,89 program dukungan manajemen; dan
- tiga, 93,67 program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Kami laporkan.

Ketua Rapat yang kami hormati,

Saya di Sekretariat Kabinet sudah sembilan tahun, dan selama masa itu semuanya kita WTP dan *alhamdulillah* berjalan dengan baik.

Realisasi APBN berdasarkan jenis belanja. Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal:

- 99,09;
- 96,99; dan
- 99,09.

Sama dengan tadi yang sudah kami laporkan, yaitu sembilan belas, 98,38%.

Anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2024 sampai dengan bulan Mei tanggal 31 Mei, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan dan juga Menteri Bappenas, pagu APBNP Sekretariat Kabinet yaitu 424 miliar dan seterusnya.

Kami laporkan sampai dengan tanggal 31 Mei, program dukungan manajemen 46,07%, *on the right track*, sesuai dengan apa yang sudah kita jaga bersama.

Untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena kemarin kita ada Pemilu, agak menurun sedikit. Tapi, kami meyakini bahwa sampai dengan akhir tahun 2024, pasti kurang lebih juga, mudah-mudahan di atas 98 atau 99% capaiannya.

Yang berikutnya, berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Seperti yang kami laporkan:

- belanja pegawai 46,71%;
- belanja barang 39,13%;
- belanja modal 55,52%.

Sama dengan yang kami laporkan sebelumnya yaitu 44,62% sampai dengan tanggal 31 Mei.

Jadi, kalau kita hitung sampai dengan bulan Juni, kurang lebih angkanya pasti mendekati 50%. Sehingga, dengan demikian selama 6 bulan tercapai seperti yang sebelum-sebelumnya.

Ketua Rapat yang kami hormati,

RAPBN Sekretariat Kabinet tahun 2025, pagu indikatif kita 428.946 dan seterusnya, dan seterusnya. Berdasarkan surat dari Ibu Menteri Keuangan, dan Kepala BPN, Kepala Bappenas, dan mudah-mudahan karena tahun 2025 sudah pemerintahan baru, saya termasuk yang nanti, kalau diizinkan oleh Ketua Rapat, ingin meminta tambahan. Karena selain untuk keperluan yang sama, karena pada tahun ini kita mulai juga mengirim atau ada perpindahan sebagian ASN kita ke IKN, tentunya ada perubahan. Dan untuk itu kami mohon persetujuan dari Ketua Rapat dan juga Para Anggota yang kami hormati untuk bisa disetujui.

Usulan pergeseran anggaran antar program Sekretariat Kabinet, ada kami mengusulkan 11 miliar lebih. Untuk melalui anggaran dari program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden, itu dipindahkan ke program dukungan manajemen. Karena rapat-rapat dan juga karena nanti pasti sebagian juga ada di IKN, sehingga dengan demikian maka

perlu ada tambahan anggaran yang kurang lebih pergeseran itu terjadi dari pagu indikatif yang ada adalah 11 miliar 467 ribu, eh, juta lebih.

Yang terakhir, yang ingin kami sampaikan.

Ketua Rapat yang kami hormati,

Kami mengusulkan adanya usulan tambahan anggaran tahun 2025. Dan usulan itu bukan tentunya bagi pemerintahan ini atau bagi kami pribadi dan Sekretariat Kabinet yang ada sekarang ini. Tapi, untuk pemerintahan baru ke depan. Karena tidak mungkin untuk tidak ditambah. Karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta. Sehingga, dengan demikian ada pasti ada penambahan anggaran.

Kami mengusulkan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 164 miliar 310 juta dan seterusnya, yang digunakan:

- Yang pertama untuk kebutuhan anggaran operasional sarana prasarana Sekretariat Kabinet di Ibu Kota Negara dan pengadaan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data;

Kenapa ini kami usulkan? Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, kita memang *green energy*.

- Yang kedua adalah kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk kebutuhan 2025;
- Yang ketiga adalah kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan;
- Dan yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke *event* internasional. Karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet.

Ketua Rapat yang kami hormati,

Karena untuk tahun 2025 ini yang akan menyelenggarakan adalah Sekretariat Kabinet yang baru, tentunya kami akan mempersiapkan secara baik-baik. Dan kami mendoakan mudah-mudahan Sekretariat Kabinet yang baru adalah yang memang memahami apa yang menjadi tugas pokok Sekretariat Kabinet. Karena Sekretariat Kabinet itu hampir semua Keppres yang ada, yang berkaitan dengan eselon I dan pejabat itu di situ. Sehingga, dengan demikian tugasnya tidak ringan, termasuk persetujuan Permen dan sebagainya.

Dan kami mengharapkan dan mudah-mudahan kami mendoakan, orang yang punya pengalaman baik di DPR maupun di eksekutif yang menjadi Sekretariat Kabinet atau yang menjadi Menteri yang ada di istana.

Demikian, Ketua yang kami hormati.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri, Pak Pramono Anung.

Bapak/Ibu yang berminat menyampaikan kado untuk beliau, dapat disampaikan setelah rapat ini. Tidak tertutup kemungkinan Pak, ya?

Berikut kami persilakan Bapak Menteri Sekretaris Negara.

Nanti ke kiri, Pak Moel.

Silakan, Bapak.

SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA (Drs. SETYA UTAMA, M.Si.)

Terima kasih, Bapak.

**Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi II Bapak Syamsurizal, dan Para Anggota Komisi II,
Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung yang berbahagia,**

Karena sedang ulang tahun, yang mendoakan di ruangan ini lebih dari 40 orang, Pak. Jadi, *alhamdulillah*. Makbul *alhamdulillah*, Pak *insya Allah*.

**Yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Moeldoko,
Yang kami hormati Bapak Kepala PPIB, Pak Yudian Wahyudi,
Para Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Semoga Pak Wakil Ketua dan segenap Anggota Komisi II beserta semua selalu berada dalam lindungan limpahan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa.

**Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati,
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Menindaklanjuti surat yang kami terima, kami akan menyampaikan:

- Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023;
- Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2024; dan

- Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025.

Kami akan mulai dengan target PNBPN Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023, sejumlah 436 miliar 999 juta lebih yang terdiri dari:

- PNBPN di PPK, GBK sejumlah 217 juta, *eh* maaf, 217 miliar 755 juta lebih; dan
- BLU Kemayoran 216 miliar 182 juta lebih; dan
- PNBPN lainnya Kementerian Sekretariat Negara 3 miliar 315 juta lebih.

Kemudian setelah mempertimbangkan peningkatan potensi PNBPN, kami merevisi dengan menaikkan target PNBPN di PPK, GBK menjadi 310 miliar lebih. Dari 217 menjadi 310 lebih. Sehingga, total PNBPN targetnya adalah 530 miliar lebih di tahun 2023.

Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember target PNBPN berhasil kita capai, sebesar 605 miliar lebih atau melampaui target sebesar 114,21%.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 821 tanggal 4 Oktober, pagu alokasi anggaran untuk 2023 ditetapkan sebesar 2 triliun 609 miliar lebih. Seiring dengan dinamika pelaksanaan anggaran pada tahun tersebut alokasi anggaran kami mengalami penyesuaian.

- Ada *automatic adjustment* sebesar 154 miliar 21 juta lebih; kemudian
- Ada pemotongan anggaran terkait belanja pegawai melalui alokasi belanja bendahara umum negara, sebesar 44 miliar lebih; dan
- Kedua, mempertimbangkan peningkatan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara, kami telah mengusulkan pembukaan blokir sejumlah 909 miliar lebih.; dan
- Ketiga, penambahan anggaran sebesar 104 miliar 951 juta lebih yang bersumber dari saldo BLU Gelora Bung Karno dan BLU PPKK untuk berbagai kegiatan di kedua BLU tersebut; kemudian
- Dinamika yang lain, penambahan anggaran belanja dari PNBPN sebesar 14 miliar 776, empat ratus, 14 miliar 429 juta lebih penambahan untuk, atas realisasi PNBPN pada satuan kerja di Gelora Bung Karno; dan juga
- Kelima, penambahan anggaran dari bendahara umum negara sebesar 1 triliun 918 miliar untuk kegiatan Persiapan dan Penyelenggaraan serta Pengamanan Penerimaan Kepala Negara, Para Pemerintahan, Pimpinan Organisasi Internasional pada KTT ASEAN ke-42 dan 43 tahun 2023, yang menjadi tugas dan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara; kemudian
- Yang keenam, penambahan anggaran hibah luar negeri sebelas, 11 miliar lebih.

Sehingga setelah mengalami penyesuaian-penyesuaian tersebut, maka pagu anggaran dari Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023, total mencapai 4 triliun 614 miliar 692 juta. Yang terdiri dari dua program, yaitu:

- program dukungan manajemen; dan

- program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Pak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa per tanggal 31 Desember 2023, realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar 97,31% atau 4 triliun 490 miliar lebih, sudah termasuk realisasi untuk kedua BLU.

Kalau tidak diperhitungkan untuk kedua BLU, maka realisasinya akan lebih tinggi lagi sebesar 97,80%.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran dan kinerja, Kementerian Sekretariat Negara telah mendapatkan:

- Penilaian yang "sangat baik" untuk indikator kinerja pada, dari Kementerian Keuangan;
- Predikat "A" atas laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" sejak tahun 2010.

Terima kasih atas dukungan selalu dari Komisi II.

Berkenaan dengan data anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2024, kami akan mengawali dengan penyasaran target PNBPN. Target semula adalah 470 miliar 427 juta lebih. Yang terdiri dari:

- Target pada PPK Gelora Bung Karno 239 miliar; dan
- Target pada PPK Kemayoran 227 miliar lebih; dan
- Target dari PNBPN lainnya di Kementerian Sekretariat Negara 3 miliar lebih.

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa pagu alokasi anggaran untuk Sekretariat Negara di tahun 2024 tetapkan sebesar 2 triliun 657 miliar lebih. Kemudian, pagu tersebut mengalami penambahan alokasi sebesar 367 miliar dengan rincian:

- Pertama, penambahan lokasi anggaran sebesar 98 miliar untuk, yang bersumber dari penggunaan saldo awal kas BLU, GBK, dan Kemayoran; kemudian
- Penambahan alokasi anggaran dari Perbendaharaan Umum Negara untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana perkantoran di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar Rp254 miliar lebih; dan
- Ketiga, penambahan anggaran hibah luar negeri sebesar 14 miliar 498 juta lebih.

Dengan jumlah penyesuaian itu, maka anggaran Kementerian negara tahun 2024 menjadi sebesar 3 triliun 25 miliar lebih, yang terdiri dari:

- program dukungan manajemen; dan program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian, ada *automatic adjustment* melalui pemblokiran DIPA sebesar 84 miliar 21 juta lebih. Dan yang dapat digunakan pemblokiran tersebut adalah sebesar 2 triliun 941 miliar lebih setelah pemblokiran tersebut.

Pak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Bahwa realisasi penerimaan PNBPN dari target-target tadi adalah, untuk saat ini, mencapai 63,50%, ya. Dan dari pagu anggaran sebesar 31,84%.

Kami optimistis dengan kerja keras dan sinergi dengan para pemangku kepentingan. Dan karena masih adanya kegiatan yang masih berjalan dan belum dipertanggungjawabkan, maka capaian kami masih dapat terus meningkat dalam waktu cepat.

Kemudian, untuk tahun 2025 target PNBPN kami dapat sampaikan meningkat, mencapai 736 miliar 69 juta lebih atau naik 56,47%. Terdiri dari:

- PNBPN BLU PPK Gelora Bung Karno, sebesar 503 miliar 14 juta lebih; dan
- PNBPN BLU PPK Kemayoran sebesar 229 miliar lebih; serta
- PNBPN lainnya Kementerian Negara 3 miliar 549 juta lebih.

Kemudian, terkait dengan pagu indikatif adalah sebesar 2 triliun 472 miliar 916 juta lebih, atau turun sekitar 6,95% jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2024 setelah penyesuaian, yang sebesar 3 triliun 25 miliar lebih, maka pagu indikatif tersebut turun 18,26%. Pagu indikatif tersebut juga dialokasikan untuk dua program:

- Program dukungan manajemen sebesar 1 triliun 301 miliar lebih; dan
- Program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar 1 triliun 171 miliar lebih.

Kemudian, kami sampaikan bahwa setelah melaksanakan trilateral *meeting* dengan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan, kami mengusulkan penyesuaian pada alokasi indikatif untuk dua program. Jadi, sebagai berikut:

- Untuk dukungan manajemen menjadi 1 triliun 665 miliar lebih; dan
- Untuk program penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden menjadi sebesar 807 miliar 836 juta lebih.

Penyesuaian pagu indikatif telah memperhitungkan berbagai aspek, termasuk dinamika pelaksanaan anggaran dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, serta peran dan fungsi yang akan dijalankan oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tahun 2025.

Demikian beberapa butir pengantar yang dapat kami sampaikan. Apabila Bapak Pimpinan beserta para Anggota Komisi II masih menginginkan pendalaman, kami didampingi dengan Bapak Para Satker siap memberikan penjelasan yang diperlukan.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi, pertanyaan juga nanti *nih*. Karena kok turun? Begitu, ya. Tadi dengan alasan pindah ke IKN, Pak Pram naik di anggarannya. Pak Mensesneg ini bilang turun.

Kami persilakan Kepala Staf Kepresidenan, Pak Moeldoko.

KEPALA STAF KEPRESIDENAN (Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. MOELDOKO, S.I.P., M.A.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang terhormat Bapak Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. beserta seluruh Anggota Komisi II DPR RI yang berbahagia, Hadirin sekalian yang saya hormati,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, dan

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam Kebajikan,

Bapak Pimpinan,

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI atas undangannya kepada kami untuk mengikuti rapat pada hari ini.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Perkenankan kami terlebih dahulu menyampaikan penjelasan, terkait evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2023 sebagai berikut:

- Kantor Staf Presiden mendapatkan pagu alokasi anggaran 2023 sebesar 120 miliar 704 juta dan seterusnya;
- Capaian realisasi anggaran tahun 2023 adalah 118 miliar 995 juta dan seterusnya, atau dalam persentase 98,58% dari alokasi anggaran tahun 2023. Dan rinciannya telah kita sampaikan dalam lampiran I.

Realisasi anggaran tahun 2023 tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program prioritas nasional, pengelolaan

strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi, serta pengelolaan isu strategis.

Perkenankan kami sampaikan pula bahwa dalam hal pelaksanaan anggaran dan kinerja tahun 2023 Kantor Staf Presiden telah mendapatkan beberapa apresiasi.

- Yang pertama dari Kementerian Keuangan mengapresiasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA tahun 2023 sebagai peringkat kedua terbaik untuk kategori satker dengan pagu yang sedang.
- Berikutnya, yang kedua dari PPK juga telah memberikan opini "wajar tanpa pengecualian" pada pelaksanaan anggaran dan kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2022 termasuk di dalamnya, Kantor Staf Presiden sebagai salah satu satker di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Apresiasi yang kami peroleh tersebut tentunya tidak lepas dari dukungan saran dan rekomendasi dari Komisi II. Untuk itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih. Dan semoga sinergi yang baik selama ini kita tetap bisa pertahankan dengan baik.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang kami hormati, serta Hadirin sekalian yang berbahagia,

Selanjutnya, kami sampaikan penjelasan terkait anggaran 2024 sebagai berikut: Kantor Staf Presiden mendapatkan pagu alokasi anggaran 2024 sebesar 122 miliar 33 juta dan seterusnya.

Menindaklanjuti Surat Sekretariat, saya ulangi. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B.19/KSN/SPR dan seterusnya, tanggal 8 Januari 2024, hal *automatic adjustment* belanja pada bagian anggaran 007, Kementerian Sekretariat Negara tahun 2024. Pagu alokasi anggaran tahun 2024 Kantor Staf Presiden mendapatkan blokir *automatic adjustment* sebesar 4 miliar 766 juta dan seterusnya.

Dengan demikian, apabila memperhitungkan blokir *automatic adjustment* tersebut, maka pagu alokasi anggaran Kantor Staf Presiden tahun 2024 yang dapat digunakan saat ini adalah sebesar 117 miliar 266 juta dan seterusnya.

Adapun capaian anggaran sampai dengan tanggal 3 Juni 2024, sebesar 40 miliar 950 juta dan seterusnya atau 35% ulangi 35,77% dari alokasi anggaran tahun 2024 setelah penyesuaian blokir *automatic adjustment*.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati, Hadirin sekalian,

Berikut akan kami sampaikan penjelasan terkait rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut: Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B.40/KSN dan seterusnya tanggal 29 April 2024, hal

penyampaian pagu indikatif tahun 2025 pada unit organisasi atau lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Kantor Staf Presiden mendapatkan pagu indikatif tahun 2025 sebesar 118 miliar 376 juta dan seterusnya.

Rincian pagu indikatif, kami sajikan dalam tabel lampiran III. Dan pagu indikatif tahun 2025 dialokasikan untuk dua program:

- Yang pertama, program penyelenggaraan layanan kepada presiden dan wakil presiden sebesar 14 miliar 277 juta dan seterusnya. Dengan kegiatan pengendalian program-program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik; serta
- Yang kedua, program dukungan manajemen sebesar 104 miliar 98 juta dan seterusnya. Dengan kegiatan, penyelenggaraan dukungan manajemen Kantor Staf Presiden.

Pagu indikatif tahun 2025 mengalami penurunan anggaran sebesar 3 miliar 656 juta dan seterusnya, atau 3%. Apabila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran tahun 2024.

Perbandingan pagu indikatif tahun 2025 dengan pagu alokasi anggaran 2024 kami sajikan dalam tabel atau lampiran keempat.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati, dan Hadirin sekalian berbahagia,

Kalau tadi dari Pak Seskab mengajukan kenaikan anggaran, kami juga mengalami penurunan anggaran. Padahal kita harus menghadapi perubahan itu mobilisasi dan kantor baru. Saran kami, penurunan anggaran 3% mungkin perlu dipertimbangkan kembali atau bahkan bisa ditambah. Karena, bisa dipastikan nanti akan ada dinamika baru di kantor yang baru.

Demikian.

Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati dan saya banggakan,

Dan selanjutnya, kami mohon ada masukan dan mungkin saran-saran bagi kami untuk perbaikan ke depan.

Demikian. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Terima kasih, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Moeldoko.

Tadi beliau menyebutkan saya lengkap, saya balas Pak, lengkap. Jenderal TNI, saya tidak jenderal. Itu saja bedanya.

Terima kasih, Pak Moeldoko.

Terakhir, kami persilakan Bapak Prof. Yudian Wahyudi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Silakan, Pak.

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.)

Yang saya hormati Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Dr. H. Syamsurizal, M.Si., dan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang saya hormati Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia mewakili,

Yang saya hormati Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,

Yang saya hormati Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, dan

Para Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Pancasila!

Kalau yang berdiri, yang di PDIP, Pak. Oke, mohon izin.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami mengawali dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan beserta Anggota Komisi II DPR RI atas undangan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat. Kami berharap kerja sama telah terjalin dengan baik dan kesinambungan sampai di masa yang akan datang.

Pimpin dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Izinkan saya menyampaikan pada tahun 2023 lalu, BPIP mendapatkan anggaran sebesar Rp357.496.465.000,00. Adapun alokasi pagu blokir atau kebijakan *automatic adjustment* dari Kementerian Keuangan sebesar Rp9.655.450.000,00. Sehingga, pagu akhir BPIP tahun 2023 menjadi Rp347.841.015.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Realisasi anggaran BPIP tahun 2023 sebesar Rp335.364.672.060,00 atau sebesar 96,41% dari total pagu tahun 2023. Adapun rincian realisasi anggaran per program, yaitu:

1. Program dukungan manajemen realisasi sebesar Rp186.649.389.263,00 atau sebesar 98,45%; dan
2. Program pembinaan ideologi Pancasila realisasi sebesar Rp148.715.282.797,00 atau sebesar 93,97%.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Capaian strategis BPIP pada tahun 2023, yakni :

1. Implementasi aktualisasi nilai Pancasila melalui gerakan aksi Pancasila dan gotong royong melawan *stunting* yang diselenggarakan di Yogyakarta;
2. Sosialisasi pancasila, nomor dua, di daerah melalui kegiatan sosialisasi Pancasila kerja sama dengan Dewan Terhormat Yang Agung Indonesia di 54 lokus pada periode Oktober sampai dengan Desember 2023;
3. Penghargaan Pimpinan, mohon maaf, pembinaan ideologi Pancasila atau PIP melalui program penganugerahan ikon prestasi Pancasila tahun 2023 yang diselenggarakan di Bandung. Penghargaan ini diberikan kepada lima orang yang terdiri dari bidang sains dan inovasi, kewirausahaan sosial, seni dan budaya, lintas iman, dan olahraga;
4. Pengawasan kebijakan regulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila melalui pengkajian dan penjelasan peraturan perundang-undangan selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sebanyak sepuluh peraturan;
5. Penyusunan norma standar dan prosedu, prosedur dan kriteria atau SPK materi, bahan ajar, dan metode PIP melalui penyusunan dan peluncuran buku teks utama Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah atau PAUD sampai dengan SMA. Dan telah diterbitkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 026.C/H/P/2023 tentang Penetapan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka;
6. Pelaksanaan sertifikasi pendidik dan pelatih pendidikan dan pelatihan atau Diklat PIP. Dari 461 orang yang terdaftar, sebanyak 226 orang yang dinyatakan lulus proses sertifikasi. Yang terdiri dari 97 orang internal BPIP dan 165 orang pengajar diklat PIP, eksternal BPIP. Dengan kualifikasi utama sebanyak 47 orang, kualifikasi menengah sebanyak 42 orang, dan kualifikasi dasar sebanyak 76 orang dari berbagai kementerian/lembaga, instansi, dan perguruan tinggi se-Indonesia;
7. Pelaksanakan, mohon maaf. Pelaksanaan diklat PIP melalui program pelatihan eksekutif nasional kepada kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah sebanyak 63 orang dan PIP kepada generasi muda melalui program pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Di antaranya kepada Paskibraka tahun 2022 tingkat nasional, sebanyak 76 orang Paskibraka, mohon maaf, Paskibraka tahun 2022 tingkat provinsi/kabupaten/kota sebanyak 6.455 orang;
8. Pelaksanaan upacara peringatan Hari Pancasila tahun 2023 pada tanggal 1 Juni di Monumen Nasional Jakarta, yang dipimpin langsung oleh Presiden dan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
9. BPIP mendapat predikat “wajar tanpa pengecualian” atau WTP atas laporan keuangan tahun 2023. Sehingga, BPIP hingga saat ini telah

mendapatkan lima kali opini WTP atas laporan keuangan tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati,

Alokasi anggaran BPIP tahun 2024 senilai Rp342.269.037.000,00 turun sebesar 4,26% dari tahun 2023. Adapun alokasi pagu blokir atau *automatic adjustment* tahun 2024 sebesar Rp26.599.217.000,00. Sehingga, total anggaran setelah pagu blokir adalah sebesar Rp313.669.822.000,00 yang digunakan untuk membiayai dua program.

BPIP memiliki dua program, yaitu:

- Program dukungan manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp178.829.323.000,00; dan
- Program pembinaan ideologi Pancasila senilai Rp134.840.497.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Realisasi anggaran BPP sampai dengan 3 Juni 2024 sebesar 180 juta mohon maaf, Rp180.214.285.137,00 atau sebesar 57,45% dari total pagu tahun 2024. Adapun rincian realisasi anggaran per program yaitu:

1. Program dukungan manajemen realisasi sebesar Rp136.896.014.387,00 atau sebesar 75, mohon maaf 76,55%; dan
2. Program pembinaan ideologi Pancasila, realisasi sebesar Rp43.318.270.750,00 atau sebesar 32,13%.

Pimpinan dan anggota Komisi II yang kami hormati,

Pada tahun 2024 kegiatan dan capaian strategis periode Januari sampai dengan Juni 2024, BPIP adalah:

1. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan kementerian/lembaga dan daerah dan di antaranya Kementerian Hukum dan HAM, Universitas Gajah Mada, UIN Sunan Kalijaga, dan lain-lain;
2. Monitoring, evaluasi, dan sosialisasi buku teks utama pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah serta penggunaan buku teks utama perguruan tinggi melalui penguatan jaringan pendidikan Pancasila di Medan, Sumatera Utara;
3. Penyelarasan dan normalisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan perundang-undangan dan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintah daerah dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila, guna evaluasi kebijakan dan regulasi di lingkungan Pemerintah Sumatera Selatan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Penetapan arah kebijakan PIP melalui Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2024;
5. Akreditasi lembaga diklat PIP melalui verifikasi dan penilaian akreditasi penyelenggara pendidik dan pelatih PIP periode I tahun 2024 di Jakarta;

6. Pelaksanaan latihan *training of trainers* atau TOT PIP melalui diklat bagi pengajar PIP berbasis buku teks utama pendidikan Pancasila di Jakarta;
7. Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih diklat PIP melalui *assessment* peserta sertifikasi penceramah dan pengajar Diklat PIP tahun 2024 di Jakarta;
8. Standarisasi dan kurikulum diklat PIP yang telah diselesaikan sampai dengan Triwulan I adalah dua NSPK;
9. Rekrutmen seleksi dan pelatihan Paskibraka serta penetapan purna Paskibraka duta Pancasila, di antaranya dengan melalui pengukuhan Paskibraka pada tanggal 1 Juni 2024 yang lalu;
10. Pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, di antaranya melalui proses penghitungan capaian indikator; dan
11. Upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2024 di Kota Dumai, Provinsi Riau, yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati,

Dapat kami sampaikan bahwa, mohon maaf, alokasi pagu indikatif BPIP tahun 2025 sebesar Rp299.428.347.000,00. Adapun, mohon maaf, rincian alokasi pagu BPIP 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program dukungan manajemen sebesar Rp172.080.927.000,00;
2. Program pembinaan di Pancasila sebesar 127 miliar 300, mohon maaf iya benar, Rp127.347.420.000,00.

Anggaran BPIP dari tahun 2023 sampai dengan 2025 terus mengalami penurunan.

Anggaran BPIP tahun 2024 turun sebesar 100, mohon maaf *subhanallah*, Rp15.227.428.000,00 atau sebesar 4,26% dari tahun 2023.

Dan pagu anggaran BPIP tahun 2025 turun sebesar 42 juta miliar, *masyaallah*, mohon maaf Pak, waktu di pesantren enggak belajar matematika soalnya. Turun sebesar Rp42.840.690.000,00 atau sebesar 12,52% dari tahun 2024.

Perlu kami sampaikan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan strategis sebagaimana telah kami tuangkan dalam paparan.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

BPIP mengajukan usulan tambahan anggaran 2025 dengan total senilai Rp100.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk :

1. Penguatan jaringan relawan Pancasila melalui penanaman nilai-nilai Pancasila, kolaborasi dengan lembaga tinggi negara atau legislatif, K/L, pemerintah daerah, dan komponen lainnya sebesar Rp18.000.000.000,00;

2. Peningkatan penyesuaian rancangan produk hukum dan pengawasan regulasi sebesar Rp4.000.000.000,00;
3. Perumusan peta jalan PIP, pengkajian dan perumusan standarisasi materi PIP sebesar Rp7.405.500.000,00;
4. Penyelenggaraan diklat PIP sebesar Rp4.000.000.000,00;
5. Fasilitasi pelaksanaan pembinaan Paskibraka dan Purna Paskibraka, duta Pancasila sebesar 10.000.000.000,00;
6. Pelaksanaan pengukuran pelebagaan Pancasila sebesar Rp5.000.000.000,00;
7. Pelaksanaan dukungan manajemen sebesar Rp6.000.000.000,00; dan
8. Pelaksanaan sosialisasi Pancasila untuk *content creator, youtuber, influencer, tiktokers* sebesar Rp 45.594.500.000,00.

Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Kerja pada hari ini. Besar harapan kami, kiranya apa yang telah kami sampaikan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Atas perhatian dan peran Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA (Prof. Drs. K.H. YUDIAN WAHYUDI, M.A., Ph.D.)

Salam Pancasila.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Salam.

Terima kasih Bapak Profesor Yudian Wahyudi dari BPIP yang sudah menyampaikan ke hadapan kita sekalian realisasi tahun anggaran 2023, dan perkembangan 2024, serta ajuan anggaran untuk tahun 2025.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Dari empat kementerian dan lembaga ini, dua di antaranya menyampaikan ajuan untuk tambahan anggaran dan dua belum mengajukan anggaran, walaupun itu turun.

Logikanya, pagu indikatif untuk tahun ke tahun sebetulnya, ya, tidak boleh turun. Karena, fakta di Indonesia ini perjalanan inflasi saja tahun 2000

awal itu nilai tukar rupiah itu 2.500 per-1 dolar. Terus bergerak 5.000, bergerak lagi 6.000, 7.000, 9.000 dan bahkan hari ini sudah mencapai 16.000 lebih. Itu artinya perjalanan inflasi. Semestinya, anggaran kita untuk mencapai kinerja sama dengan tahun sebelumnya, harus mengikuti perkembangan inflasi tersebut semestinya.

Ditambah lagi ada *blocking budget* dalam bentuk *justice, automatic justice* dari Kementerian Keuangan itu sekitar 5 sampai 6, atau 10%. Saya kira memang tidak boleh turun.

Oleh karena itu, memang kalau nanti disepakati dengan teman-teman, kita akan usahakan supaya setidaknya-tidaknya menyesuaikan dengan keadaan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di tanah air. Supaya, dia setidaknya-tidaknya sama dengan kinerja tahun sebelumnya. Jadi, ini yang menurut pikiran saya sementara ini.

Baik.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Kita terus sepakati pukul 11.15, tapi-

Belum, Pak. Belum, sebentar. Yang jelas Pak Supardi dulu, Pak Guspari.

Kita sepakati untuk menambah jamnya menjadi 12.00 barangkali. Tapi, barangkali kita harapkan ini tidak boleh bertambah lagi. Kita paskan saja pukul 12.00. Karena, sebab 11.30 itu kita sudah ditunggu oleh dari Kementerian lain, ya. Kalau tak salah dari Kementerian Agraria dan Badan Pertanahan Nasional.

Kami melakukan pendalaman, tapi diharapkan untuk tidak terlalu panjang, simpel-simpel saja.

Pertama, silakan Pak Guspari Gaus, dan Pak Kamran, dan Pak Cornelis, dan Pak, Pak Amin, Pak, Pak Heru, ya.

Silakan, Pak Guspari.

F-P. PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Bapak Mensetkab, Pak Pramono Anung,**

Saya juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-, enggak usah saya sebutkan saya sudah tahu, tanggal 11 Juni. Rupanya saya lebih tua dari Pak Pramono, tujuh tahun dari beliau ini. Kita kelahirannya sama,

Pak. Saya kelahirannya sama dengan Pak Harto, tanggal 8 bulan Juni. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan makin sukses.

Kemudian,

**Pak Sekretaris Mensetkab,
Mensetneg,
Pak Moeldoko Jenderal Purnawirawan Kepala KSP,
Profesor,**

Sahabat saya, yang meminta tambahan anggaran 100 M.

**Bapak/Ibu,
Hadirin dan hadirat yang berbahagia,**

Menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak terhadap paparan-paparan yang disampaikan, pertama tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mitra kami yang mendapatkan, tidak usah saya sebutkan, sangat baik, predikat WTP, dan lain sebagainya. Terlalu panjang untuk saya ungkapkan. Intinya adalah saya berharap kerja-kerja daripada mitra kami ini, makin baik, makin sempurna, makin mendedikasikan dirinya untuk.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Izin Pak Gaus, sebentar saja. Karena, mau ke toilet.

Sesudah ini langsung Pak Kamran, ya. Mudah-mudahan bisa keburu.

Silakan, Pak.

F-P. PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.)

Eggak bisa diwakili, ya?

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Eggak ada yang, kalau itu tak bisa diwakilkan itu, Pak.

F-P. PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.)

Ya, oke.

Hari ini adalah merupakan hari kedua kami dalam melakukan pembahasan anggaran dan evaluasi terhadap anggaran yang sebelumnya.

Saya mencatat secara seksama terhadap kinerja yang Bapak-bapak sampaikan itu. Agaknya, saya memberikan apresiasi yang luar biasa pada hari ini dibandingkan dengan yang kemarin. Prestasi yang Bapak raih terhadap di

samping penghargaan-penghargaan itu, terutama yang berkaitan terhadap realisasi daripada anggaran. Terutama, Pak Mensetkab 98,38%. Luar biasa.

Bergandengan dengan Pak KSP, Pak Moeldoko 98,58. Agaknya dua hari ini belum ada yang mencapai angka yang semacam itu. Kementerian Dalam Negeri hanya 97,25, IKN 95,4%, KPU 96,88%. Bawaslu, kemarin saya marah, anggarannya sangat luar biasa 9,9 T. Sisa anggaran 900 miliar, capaiannya cuma 86,36%.

Mensetkab pada hari ini mencatat sesuatu yang menggembirakan bersama KSP, yaitu 98 lebih atau 98,38. Bersama KSP 98,58. Sedangkan, Mensetneg hanya 97. Makanya, saya katakan hanya karena di bawah dari Mensetneg dan Mensetkab walaupun anggarannya berbeda dengan kedua institusi yang saya sebutkan itu.

Kemudian, sangat elok apa yang disampaikan oleh Pak Pramono, bahwa beliau pada hari ini meminta kepada kita untuk melakukan pergeseran anggaran. Itu adalah aturan main yang diatur oleh Undang-Undang, di mana setiap perubahan ataupun pergeseran anggaran harus disampaikan ke DPR.

Kemarin ada indikasi Bawaslu dalam pemanfaatan atau pemakaian anggaran. Diindikasikan, kata kawan-kawan, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Sehingga, kami kemarin itu ada keputusan yang diambil adalah untuk meminta satuan tiga, untuk kita lakukan kajian lebih mendalam terhadap persepsi yang kami duga itu. Oleh karena itu, ini sesuatu berdiri bulu roma saya ini, karena memang Pak Pramono dikatakan tadi di ruang VIP, karena memang beliau sudah sangat piawai. Lima periode berada di DPR dan tahu persis aturan-aturan main dalam pembahasan dan penetapan anggaran ini, tentu saya berikan apresiasi.

Kemudian, juga disampaikan bahwa ada keinginan untuk melakukan tambahan anggaran. Saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan, mitra kita, untuk meminta tambahan anggaran dalam rangka untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kenapa tidak? Kita dorong untuk melakukan itu. Artinya, kami di sini sudah lima tahun, tidak pernah, perlu dicatat, kami memotong anggaran kementerian dan lembaga, kalau memang itu adalah sesuatu kepentingan sebagaimana saya ungkapkan tadi.

Oleh karena itu, anggaran yang dibutuhkan oleh Mensetkab sebanyak tambahan anggaran itu 164 M. Ya, Pak? 164 M kegunaannya sebagaimana dikatakan tadi. Dan tidak usah saya sampaikan, barangkali saya minta kepada kawan-kawan agar kita mendukung apa yang menjadi keinginan dari Pak Menteri kita ini.

Saya yakin dan percaya, ini bukan untuk kepentingan Pak Pramono Anung secara pribadi. Tetapi, adalah kita enggak tahu siapa yang akan menjadi. Begitu elegan dan luar biasanya beliau untuk memberikan legasi kepada siapa yang akan ditunjuk oleh Pak Prabowo sebagai Mensetkab nanti. Nilainya 164. Sedangkan, pergeseran itu saya juga minta mudah-mudahan kita menyetujuinya adalah sebanyak 11 M, 467 M. 11,467 M.

Yang kedua adalah Mensetneg. Saya tentu juga memberikan apresiasi bahwa realisasi PNPB itu sangat luar biasa dan ini selalu saya sorot setiap kita melakukan pembahasan anggaran. Baru kali inilah capaian yang sangat luar biasa, melampaui dari 100%.

Tentu kalau melampaui 100%, ada yang perlu saya pertanyakan tentang perencanaan. Apakah perencanaannya terlalu rendah sehingga lompatannya mencapai lebih dari 100%? Tentu, ini perlu dievaluasi. Sebab, bagaimanapun karena *covid* dan lain sebagainya, apakah itu berpengaruh terhadap capaian yang lompatannya melampaui 100% itu? Yaitu, 114,21%.

Namun, dalam persoalan ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimanakah kasus tentang Hotel Hilton. Apa Hotel Sultan? Karena dulu juga sudah disampaikan dan ini adalah juga merupakan *legacy* juga bagi Pak Jokowi. Mudah-mudahan persoalan itu sudah tuntas. Walaupun sudah selalu dikatakan oleh Pak Mensetneg, kita melakukan, apa, MK dan lain sebagainya. Tetapi, ada ranah hukum yang dibuka ruang juga untuk melakukan hal-hal yang sama. Oleh karena itu, tentu kami juga ingin mendapatkan informasi kepada Bapak Sekretaris. Bagaimana status apakah persoalan Hotel Sultan itu sudah selesai? "Jangan kalah," kata saya ketika itu. "...negara dengan pihak siapa pun." Itu yang saya ungkapkan ketika itu.

Namun, yang ingin juga saya sampaikan adalah tentang anggaran pada 2024, ini pada umumnya, pada umumnya semuanya saya sudah saya sebutkan satu per satu. Walaupun data saya ada di sini, capaiannya belum menggembirakan.

Sekarang ini adalah bulan Juni. Perhitungan, sebagaimana dikatakan oleh Pak Pramono, adalah per tanggal 31 Mei. Jadi, proses sekarang ini tentu akan terjadi penambahan realisasi itu. Namun, belum sebagaimana kita harapkan. Sekarang bulan Juni. Harusnya tidak ambivalen juga, kita katakan, harus 60%.

Tetapi, yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai di akhir anggaran kita tergopoh-gopoh untuk merealisasikan anggarannya untuk mencapai prestasi sebagaimana pada tahun-tahun ini. Tentu bagaimana, bagaimanapun proses realisasi anggaran itu akan berpengaruh untuk kepentingan masyarakat dan juga dinamika ekonomi. Ini tentu juga kami harapkan ada komitmen kita bersama untuk melakukan itu.

Kemudian, Mensetkab tadi juga melakukan keluhan. Tapi, beliau tidak meminta tambahan anggaran. Keinginan ada, tetapi nominal itu tidak diungkapkan karena ini nanti akan menjadi kesimpulan. Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa kita akan melakukan pemindahan Ibu Kota Negara, bagaimanapun yang Bapak-bapak ini adalah tentu akan merupakan ikutan Bapak Presiden yang punya komitmen akan pindah dan berkantor di IKN itu. *Nah*, ini yang saya baca dari berbagai media. Bagaimanapun sebetulnya anggaran Bapak-Bapak ini harusnya makin bertambah, bukan berkurang.

Tadi Pak Pramono sudah menyampaikan jumlahnya 114, *eh*, jumlahnya adalah 164. Sedangkan, Pak Yulian juga sudah menyatakan 100 M. Kemudian, supaya ini nanti merupakan kesimpulan daripada pertemuan kita pada hari ini, tolong juga staf daripada Pak Moeldoko. Ini Pak Moeldoko, ya. Pak Moeldoko sebagai Kepala KSP, tentu hari ini, bukan hari ini. Karena ini akan dijadikan kesimpulan, kesimpulan rapat, penambahannya itu berapa? Tentu, yang rasional yang realistis sesuai dengan kemampuan anggaran di tahun 2025 ini.

Itulah beberapa hal.

Terakhir adalah BPIP, Pak Yulian. Tadi juga disampaikan keluhannya adanya pengurangan anggaran. Tadi juga sudah dikomentari oleh Pimpinan, harusnya anggaran itu tidak berkurang. Harusnya paling tidak bertambah walaupun nilainya tidak seberapa, disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan-kebutuhan kenaikan harga. Namun, tadi sudah disampaikan adanya penambahan anggaran 100 M dengan program-program yang sudah disampaikan. Tentu, saya memberikan dukungan dan saya harapkan kepada kawan-kawan juga memberikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak kita itu.

Namun, saya lihat pada tahun ini biasanya kami ini dilibatkan untuk melakukan sosialisasi. Tahun ini tidak ada satu pun kawan-kawan yang dilibatkan oleh BPIP terhadap persoalan itu. Apakah gerangan sehingga kami Komisi II ini tidak dilibatkan dalam sosialisasi itu? Ini adalah tumpangan pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan kepada Prof.

Barangkali, demikian.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Guspari Gaus dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Berikut kami persilakan Pak Kamran Mukhtar Podomi dari Fraksi Nasdem.

F-NASDEM (KAMRAN MUCHTAR PODOMI, S.T.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom,

Salam Pancasila,

Yang terhormat Pimpinan rapat,

**Yang saya hormati Pak Kepala KSP Pak Jenderal,
Bapak Pramono,
Bapak Menteri Sekretaris Negara atau yang mewakili, dan
Pak Prof. dari BPIP,**

Yang pertama, perkembangan yang saya lihat satu dua hari ini. Ini, mohon maaf ini, ini untuk semuanya. Rata-rata di dalam penganggaran, walaupun kami tidak harus masuk di satuan tiga karena undang-undang membatasi itu. Pak Pram tahu persis itu. Tetapi, rata-rata anggaran yang paling besar ini dukungan manajemen. Kami tidak ingin masuk sampai satuan tiga, tapi boleh diberi keterangan. Karena ini sama saja ini, dari BPIP, dari Mensesneg, Setkab, sama Pak Moeldoko KSP. Rata-rata dukungan manajemen ini, dia termasuk mata anggaran yang paling besar di semua kementerian dan lembaga. Itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Saya ikuti ini dari target penerima negara bukan pajak, PNBP lainnya ini, trennya kan naik ini. Tetapi, mohon maaf saya juga tidak, tidak tahu berapa BUMN di bawah Sekretariat Negara termasuk misalnya Hotel Sultan, Berdikari *Insurance*. Apakah kelompok ini yang masuk di dalam ini Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya?

Karena, ini agak lumayan. Dari 2003 tiga, kemudian dia naik 3490, kemudian dia naik 3549. Lagi-lagi hanya dijelaskan secara umum saja karena memang kami dibatasi oleh undang-undang sampai masuk ke satuan tiga. Kami tidak ingin masuk kepada wilayah-wilayah yang pada akhirnya kita tidak sepakat bahwa undang-undang itu harus kita patuhi bersama.

Kemudian, Pak Moeldoko ini kan ada di wilayah Kepresidenan. Ini *kok* tiba-tiba turun 3% ini. Padahal kita tahu bulan Agustus bahkan mungkin bulan Juli, Pak Presiden harus berkantor di IKN. *Nah*, tiba-tiba anggarannya turun ini. Jangan sampai kita ada masalah.

Ada pergeseran, itu luar biasa. Dari 2024 sampai 2025 paling minimal pagu indikatif ada, adalah anggaran yang lama. Tidak boleh kita, kondisi ekonomi juga Pak Jenderal kan bisa berubah. Dan itu akan mengubah semua anggaran yang kita tata. Sehingga, sebaiknya memang saya sepakat dengan Pak Gaus. Harus diinikan sekarang, walaupun nanti pendalamannya nanti ada waktu untuk pendalaman.

Kemudian, terkait dengan BPIP. Ini yang terasa di bawah ini kan. Karena, BPIP ini bicara nilai *outcome*-nya nilai kan, ya. Saya belum tahu batu ujinya apa kira-kira? Tapi, yang terasa di daerah Pak, itu Paskibraka. Karena Paskibraka ini, ininya dengan BPIP. *Nah*, termasuk anggaran di daerah Bu. Diperhatikan juga itu Paskibraka yang, kita sudah tahulah, kalau anak-anak di daerah, orang tuanya petani. Tapi, mereka bangga jadi peserta Paskibraka walaupun tingkat kabupaten/kota. Apalagi, mereka sampai hari ini dari wilayah saya sudah datang ini ikut di IKN, ya. Sudah tanam bendera di IKN.

Ini kan kita bicara tentang nilai. Dan nilai ini kalau kita sudah bicara nilai, itu bukan bicara satu dua hari. *Nah*, kita menanamkan ini ideologi ini. Tetapi, kalau batu ujinya Pemilu? Kan jadi masalah, ya. Kalau batu ujinya Paskibraka, mereka hari ini sudah dua hari lalu sudah ke IKN tanam bendera. Itu bagus. Tapi, kalau batu ujinya adalah Pemilu, misalnya menolak *money politic* dan lain-lain, boleh enggak seperti itu? *Nah*, ini pekerjaan menebar nilai-nilai baik, nilai-nilai ideologi Pancasila di tingkat masyarakat paling bawah. Itu menjadi penting.

Nah, makanya sosialisasinya harus masif. Ini masalah ideologi. Karena, masa *sih* kita bertahun-tahun bicara ideologi terus, Pancasila enggak pernah? Pancasila, kalimat kita kan final. Tetapi, hari-hari kita masih dihadapkan pada persoalan-persoalan nilai yang tidak sama dengan apa yang kita harapkan. Sehingga memang penting ini Pak Gaus, BPIP ini penting karena ini modal kita untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mungkin itu jadi memang semuanya penting, Pak Moel. Jangan lagi diturunkan 3%, Pak Moel. Bahaya itu kalau pindah ke IKN bisa problem, ya.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom,
Salam Pancasila!

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Salam Pancasila!

Terima kasih, Pak Kamran dari Partai Nasdem.

Berikut kami persilakan Pak Gubernur, Pak Cornelis dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

F-PDIP (Drs. CORNELIS, M.H.) :

Terima kasih.

**Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Yang terhormat Pimpinan dan serta Anggota DPR RI Komisi II,
Yang terhormat Sekretaris Kabinet,
Kepala Staf Kepresidenan,
Kepala BPIP, dan
Sekretaris Setneg,**

Saya tidak berpanjang lebar. Cuma hanya sedikit yang perlu saya garis bawah. Pertama, menyangkut penambahan anggaran. Sebenarnya, para Menteri atau Kepala Staf Kepresidenan atau lembaga-lembaga lain tak usah

kalut tambah-tambah anggaranlah. Kenapa? Karena kabinet ini kan sudah mau berakhir sampai bulan Oktober selesai. Biar sajalah nanti yang baru yang memikirkannya. Mau tambah mau kurang, terserah Presiden terpilih nanti menyusun kabinetnya.

Tapi, yang paling penting sekarang bagaimana anggaran yang kita sudah susun tahun 2024 itu bisa *clear*, bisa dilaksanakan. Soal nanti, ya, urusan yang nanti sajalah. Enggak usah kita pikir dulu. Tapi, bagaimana anggaran Bapak-Bapak ini yang tahun 2024 ini sampai bulan Oktober, tanggal 1 Oktober sampai dilantiknya Presiden terpilih tanggal 20 Oktober, itu betul-betul bisa terlaksana sesuai dengan jadwal.

Nah, soal *nambah* anggaran sebenarnya enggak juga masalah. Soal inflasi atau tidak inflasi sebenarnya bukan persoalan. Inflasi itu kan hanya menghitung APBN secara keseluruhan ekonomi ke depan. Cuma tergantung kepada Menteri Keuangannya. Kalau ke Banggar *sih*, saya bawa terus, Pak. Saya sampaikan terus di Banggar. Saya juga kebetulan yang bertanggung jawab untuk Komisi II seluruh departemen/*non*-departemen. Tapi, sudah ketika berhadapan dengan Menteri Keuangan, *nah*, itu pusing kita. Tidak termasuk skala prioritas.

Nah, kami juga mohon Bapak-Bapak juga lobi Menteri Keuangannya. Ketika kita membahasnya di Banggar, bersama Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Bappenas. Ya, kita lurus-lurus saja. Karena, terakhir itu kuncinya di Kementerian Keuangan. Kalau di Banggar *sih*, *no problem*, Pak. *Nah*, dan kita tidak kurangi seberapa pun dimajukan bulat kita sampaikan. Enggak kita kurang-kurangi dan kita tidak tanya detail-detail. *Nah*, ini pengalaman saya hampir lima tahun di Banggar. *Nah*, jadi Menteri Keuangan itu kuncinya.

Saya rasa itu saja dari saya urun rembuknya.

Terima kasih.

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Selamat ulang tahun untuk Pak Pram,
Semoga panjang umur, murah rezeki, dan bisa duduk lagi jadi Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Amin ya rabbal alamin. Semoga duduk lagi di kabinet yang baru.

Terima kasih, Pak Cornelis.

Nanti, kita akan perlu melakukan analisa. Kapan kabinet Presiden baru itu akan dibentuk dan apakah ada pembahasan anggaran kalau tidak sekarang kita bahas. Nanti, kita akan hitung itu.

Kami persilakan Pak Heru Sudjatmoko.

11.35 menit saat ini.

Silakan, Pak Heru.

F-PDIP (Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si.):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Salam Pancasila!

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,
Yang saya hormati pula Prof. Yudian Wahyudi, Kepala BPIP beserta
jajaran,**

Saya urut dari sebelah kiri, Pak, mohon maaf. Juga,

**Senior saya Pramono Anung, Mensetkab,
Mensesneg dan/atau Pejabat yang mewakili,
Yang saya hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Moeldoko, KSP
masing-masing dengan semua jajarannya,**

Izinkan saya tidak bicara anggaran. Sedikit saja, Pak.

Saya hanya tergelitik kalau tidak bisa mengatakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi, yang secara sederhana bisa disebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila, ya. Saya ditertawakan enggak apa-apa, ya. Tapi, dengan segala hormat saya ingin menyampaikan pikiran ini.

Kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila. Dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para Aparatur Negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini. Pendek kata, semua dari kita.

Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Tapi, paling tidak BPIP bisa mengkonsolidasi. Katakanlah, misalnya para cerdik pandai, tokoh-tokoh yang bijak dikonsolidasi untuk membuat tulisan, misalnya, penilaian, ya, koreksi untuk diri sendiri sebagai bangsa. Apakah perilaku kita selama ini, misalnya, masih konsisten dengan nilai-nilai Pancasila? Jangan-jangan sudah jauh. Dalam bahasa Jawa,

sudah jauh, tapi enggak ada yang *aruh-aruh*. Begitu loh. Enggak ada yang mengingatkan.

Mungkin salah satu sifat manusia yang berbeda dengan malaikat, perlu diingatkan, ya. Karena malaikat selalu taat, tapi manusia punya sifat yang beragam. Bisa taat, bisa tidak taat. Setidak-tidaknya perlu diingatkan walaupun tidak dalam pengertian diadili. Karena ini masalah perilaku, etika yang sumbernya filosofi, filsafat negara. Barangkali ini bisa menjadi pemikiran. Mumpung ketemu, jadi saya sampaikan yang seperti ini dengan segala kekurangan saya.

Terima kasih.

Saya senang karena Bapak/Ibu kelihatannya mendengarkan. Itu saja bagi saya sudah membahagiakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Heru Sudjatmoko dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Beliau adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah pada masanya. Banyak pemikiran tadi yang disampaikan beliau, saya kira itu cukup bagus. Apakah BPIP akan menambah anggaran untuk pengkajian tentang bentuk, membentuk panitia atau panitia pengadaan atau panitia pembentukan Mahkamah Pancasila? Saya kira itu perlu juga.

Dikaji saja dulu barangkali Pak, kalau ditambah anggaran yang tadi sudah kita sepakati semua.

Terakhir, barangkali kami persilakan Pak Aminurokhman.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Tambah satu, Ketua. Tambah nanti setelah ini?

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Cuma waktu kita ini yang tadi sepakati.

F-P.NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita sekalian yang saya hormati,

**Sekretaris Kabinet,
Sekretaris Negara,
Kepala Sekretariat Kepresidenan,
Kepala BPIP dan seluruh jajaran yang hadir,**

Ada beberapa hal yang saya cermati. Pertama dari Setneg dulu. Kaitan dengan aset-aset negara yang hari ini menjadi sumber PNPB yang sudah disampaikan tadi. Saya hanya memberikan masukan bahwa asumsi-asumsi yang digunakan untuk penetapan dasar sumber PNPB ini betul-betul *riil*. Karena kalau saya lihat dari tahun ke tahun, itu peningkatannya tidak terlalu signifikan. Dan tahun ini kaitan dengan Hotel Sultan, saya kira juga sudah bisa dipastikan itu bagian dari aset yang dikelola. Tentu ini akan menjadi sumber baru yang cukup potensial.

Maka dari asumsi-asumsi yang digunakan ini, ke depan harapan saya, Sekretaris Negara bisa memastikan kembali bahwa potensi itu betul-betul teridentifikasi secara detail sehingga tidak ada spekulasi diluar. Masa *sih* aset sebesar ini, potensinya hanya segitu? Termasuk GBK, Kemayoran, dan seterusnya. Jadi, ini ada korelasinya dengan pendapatan negara, ya. Oleh karenanya, tadi dari paparan tadi untuk sementara kami nanti akan dalam pada saat pembahasan, pembahasannya di anggaran, ya.

Kemudian yang kedua, KSP. Pak Jenderal, tentu momentum Pilkada ini, isu-isu yang berkembang sedemikian luas. Terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang mungkin sampai ke istana, kaitan dengan keluarga besar Presiden dan sebagainya. Ini tentu harus diantisipasi dan ditangkal bahwa semua ini bagian dari *framing* yang sudah diciptakan sedemikian rupa dan ini kewajiban KSP bisa *menetralisir* isu itu.

Karena, kalau ini masyarakat tidak diberikan penjelasan terkait dengan momentum Pilkada ini, ya, kita sayangkan, Pak. Karena, Pilkada serentak ini baru pertama kali dalam sejarah Indonesia, ya. Dan itu momentumnya positif karena tahun politiknya ada di tahun 2024 saja. Kalau dulu kan enggak, Pak. Tiap tahun itu ada tahun politik. Setelah Pilkada Kepala, apa, Gubernur, kemudian Bupati/Wali kota. Hampir setiap tahun, mungkin 3 tahun dalam 5 tahun masa Pemilu itu, 3 tahun itu tahun politik terus, Pak.

Nah, kalau itu orang mau investasi melihat Indonesia setiap tahun ada tahun politik, itu ngeri Pak. Stabilitas negara ini pasti pada posisi yang dispekulasikan. *Wah*, ini nanti jangan-jangan kalau nanti Gubernur yang jadi ini, pendukungnya begini. Kepala Daerah, Bupati/Wali kota, itu yang juga berdekatan itu juga akan mengganggu investasi di daerah. Maka kaitan dengan ini, saya kira Pak Jenderal lebih memahami suasana kebatinan itu. Kiranya KSP ambil peran untuk mengambil langkah-langkah antisipasinya.

Kemudian dari Setkab, Mas Pram. Dari semua anggaran yang sudah dilaporkan, saya kira kami memaklumi. Karena, ini semua bekerja pada sebuah sistem yang mana fungsi layanan itu sudah dilakukan dengan baik.

Penyerapannya yang 2024 masih pada angka 46%. Ya, tentu harapan kita pada perjalanan berikutnya bisa disesuaikan dengan proporsi yang sudah direncanakan. Itu saja.

Yang terakhir ke BPIP barangkali, ya. Setiap rapat saya dengan BPIP, selalu saya mendorong bahwa BPIP ini jangan hanya menjadi badan yang dibentuk oleh Keputusan Presiden, Pak. Ke depan ini, bagaimana lembaga ini eksistensinya harus dikuatkan dengan undang-undang. Tapi, ini nanti kalau Presiden penggantinya ini enggak selera sama BPIP, bisa dibubarin. Enggak ada soal Pak, ya.

Tapi, kalau dibentuk undang-undang, kelembagaan ini, karena ideologi ini ke depan tantangannya juga semakin berat. Bukan hanya sekedar formalitas menjaga nilai ideologi bangsa. Bukan. Tapi, bagaimana bisa mentransformasi nilai ideologi itu menjadi sendi kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat. Program-program yang sudah disampaikan oleh BPIP, menurut saya, masih pada tataran formalitas, ya. Pada tataran yang menyentuh pada komponen-komponen masyarakat, yang masih pada tingkatan tertentu, belum pada segmen yang sampai ke bawah.

Maka, saya ingin bertanya. Tugas utama salah satu dibentuknya BPIP oleh Presiden pada saat itu: bagaimana bisa merumuskan ya program strategis yang bisa menjadi bagian dari transformasi nilai. Di situ kalau tidak salah adalah memberikan masukan dalam rumusan kurikulum pendidikan. Mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tertinggi.

Nah, sejauh mana itu bisa kami mendapatkan konfirmasi, ya. Karena kemarin di Kementerian Pendidikan sendiri ketika mengambil kebijakan-kebijakan yang kontroversi kemarin, salah satunya menghilangkan apa pendidikan kepramukaanlah. Ini dan itu. Ya, isu-isu itu bisa *di-framing* oleh pihak lain yang pada akhirnya membuat kita ini gaduh. Padahal, itu persoalan tidak substansi.

Nah, bagaimana BPIP bisa mengambil inisiatif menjelaskan hal-hal ini menjadi bagian yang bisa disinergikan antar kementerian/lembaga yang pada gilirannya bisa menjaga stabilitas.

Untuk anggaran, menurut saya, nanti akan kita dalami pada saat pembahasan. Tapi, hari ini saya hanya ingin memberikan pandangan dan masukan itu.

Saya kira ini, Pak Ketua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh .

Terima kasih Pak Aminurokhman dari Fraksi Nasdem.

Berikut kami persilakan, Pak Riyanta.

F-PDIP (RIYANTA, S.H.):

Saya dulu.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya berkaitan dengan dinamika nasional. Seperti kemarin penguntitan Jampidsus oleh oknum Densus 88, kemudian dan lain-lain. Ini mohon ini ada kaitannya dengan BPIP. Nanti, saya punya satu saran agar kawan-kawan penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, ini diberikan satu pemahaman tentang Pancasila. Jadi, jangan sampai dinamika yang berkembang saat ini justru malah menjadi penghambat bagaimana kita menuju pada pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara.

Kalau diperlukan, saya mengusulkan agar dimulai saat ini. BPIP bisa memberikan satu, apa ya, satu langkah-langkah menuju konsensus nasional untuk bagaimana agar kerukunan di dalam praktik berbangsa dan bernegara ini benar-benar bisa harmoni sesuai dengan Pancasila.

Saya akan sampaikan bahwa saat ini masyarakat kita itu sudah tidak *goblok* lagi. Jadi, masyarakat kita itu sudah memahami. Makanya sekarang yang diperlukan, bagaimana pemimpin yang bisa menjadi teladan? Kalau dalam falsafah Jawa ada "*ing ngarso sung tulodo*" ini. Bagaimana kita yang menjadi pemimpin-pemimpin dan, *insyaallah*, saya memulai. Karena memang saya setuju, kita yang menjadi pemimpin ini sebenarnya satu, apa ya, penderitaan. Bukan satu kenikmatan, menurut saya.

Jadi, mohon ini agar benar-benar kita berkepala dingin. *Toh*, kita sudah sepakat bahwa demokrasi yang kita sepakati seperti sekarang ini. Ya, *monggo*. Siapa pun yang akan menjadi pemenang, siapa pun yang akan menjadi pemimpin, tentu kita bagaimana bisa sama-sama *nyengkuyung*. Karena sekali lagi ini, saya melihat dinamikanya kurang, apa ya, kurang begitu menyejukkan.

Ini, saya mohon ini nanti untuk, khususnya kawan-kawan yang ada di lembaga perwakilan, untuk bisa bagaimana berperan sesuai dengan fungsi kita. Karena sebenarnya yang mendapatkan mandat oleh rakyat, kita sebagai anggota DPR ini. Saya ingin, sekali lagi, ke depan di dalam praktik penyelenggaraan negara ini kita benar-benar memerlukan stabilitas. Siapa pun yang akan menjadi pemimpinnya, siapa pun yang akan menjadi presidennya, itu memerlukan stabilitas.

Kemudian, ini agak yang lain. Saya sampaikan kepada Pak KSP. Kami banyak mendapatkan satu permintaan advokasi berkaitan dengan persoalan-

persoalan pertanahan Bapak. Tapi, di lembaga kepresidenan anggaran untuk itu, menurut yang saya tahu, itu tidak memadai. Apalagi, nanti kalau Ibu Kota Negara ini jadi ke IKN. Saya yakin untuk di sekitar IKN sendiri akan begitu banyaknya persoalan-persoalan pertanahan ini muncul.

Jadi, oleh sebab itu, mohon nanti Komisi II untuk bagaimana ini bisa memberikan satu atensi untuk anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan. Ini benar-benar *riil*. Karena, jangan sampai masyarakat sekarang ini menganggap bahwa bicara mafia tanah itu hanya retorika. Kenyataan, aduan-aduan itu baik ke Lembaga Presiden, ke Kementerian ATR, BPN, ke Polri, itu banyak. Tetapi, penyelesaiannya tidak begitu maksimal.

Jadi, kalau anggarannya justru diturunkan, ini yang kita harus prihatin. Jadi, bayangan saya sebagai masyarakat awam saat itu pun ketika persoalan sudah sampai Lembaga Presiden, itu akan selesai. Tapi, kenyataannya anggarannya yang, mohon maaf, ternyata tidak memadai. Kalau tidak salah di anggaran Lembaga Presiden itu yang untuk *kayak-kayak* begitu hanya 4 M. Itu saja semuanya bukan untuk penyelesaian persoalan pertanahan.

Jadi, ini yang kita mesti memahami persoalan-persoalan yang ada di lembaga-lembaga mitra kita. Khususnya yang berkaitan dengan, untuk penyelesaian hal-hal yang dapat mendorong penyelenggaraan pemerintahan itu dengan baik.

Jadi sekali lagi, Pak Prof Yudian, mohon nanti dari BPIP bisa membuat satu, apa, terobosan bagaimana dilakukan konsensus nasional atau rekonsiliasilah. Karena, saya ingin dan rakyat Indonesia pasti ingin kita ini benar-benar menjadi negara yang makmur.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Riyanta.

F-P.GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Ketua, satu. Riswanto.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Satu, Bapak.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Saya dilangkahi, Ketua. Saya dilangkahi tadi. Mestinya, saya dulu baru Riyanta.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Tambah. Mendaftar satu, Bapak.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Iya, iya.

Kami persilakan, Pak Hugua dari Fraksi PDIP.

F-PDIP (Ir. HUGUA):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan Kawan-Kawan Anggota,
Pak Prof Yudian,
BPIP,
Pak Pram,**

Pak Pram, selamat ulang tahun, Pak.

**Senior Menteri Mensetkab,
Pak Pratik Mensesneg,
Pak Jenderal Moeldoko Kepala Kepresidenan, dan
Seluruh staf dan jajaran,**

Pertama, karena ini kita bicara tentang pagu indikatif. Maka ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang kira-kira, mudah-mudahan anggarannya tidak diturunkan pada saat pagu definitif nanti. Karena menurut saya, ini begitu urgen.

Pertama, berkaitan dengan keselamatan Presiden. Bapak-Bapak bertiga, terutama di sekitar Presiden. Kaitannya protokoler dan keselamatan Presiden, karena ini tahun politik, lalu peralihan kepemimpinan nasional.

Kasus di Kabupaten Konawe kemarin, ketika Presiden ke Sulawesi Tenggara. Saya pun tidak tahu bagaimana protokoler dan *security*-nya. Sehingga, lalu ada seorang yang penyusup masuk hampir menyentuh Presiden dan hampir terjatuh.

Pada saat yang bersamaan juga di Kabupaten Muna, ada kurang lebih tujuh ibu-ibu yang harus ke rumah sakit. Karena saat helikopter kepresidenan mendarat, lalu ada cabang-cabang pohon yang terjatuh, lalu menyentuh orang-orang. Pada saat Presiden juga menuju pasar di Muna, Kabupaten Muna, tiang bendera mobil kepresidenan juga dicopot oleh masyarakat.

Saya kira ini baik tentu. Tetapi, sangat berbahaya buat seorang Presiden. Sekali lagi, ini tahun politik dan peralihan kepemimpinan nasional. *Security* Presiden sebagai simbol negara begitu penting. Sehingga, di satuan tiganya nanti, Pak Mensetneg, Pak Mensetkab, kemudian Pak Kepala Kepresidenan, juga di Kementerian Dalam Negeri, memang masalah keprotokoler-an pejabat negara juga ini, menurut saya Pak, di akhir terakhir sangat rancu ini.

Kan kita bicara protokoler, kita bicara tentang kedudukan orang, tata cara, apa namanya, upacara, berkaitan juga dengan penghormatan-penghormatan. Ya, kadang-kadang ini agak sedikit turun kualitasnya. Saya kira perlu ditegaskan kembali, ditingkatkan kembali. Karena ini berkaitan dengan tata letak, tata upacara. *Ending*-nya adalah keteraturan dan keselamatan, terutama pejabat negara.

Kalau bisa, anggarannya ditingkatkan. Kalau ada dipertahankan, bila perlu ditingkatkan. Kita kembali kepada sistem bernegara yang begitu indah, irama yang bagus. Karena kalau tata ini sudah mulai lemah, saya kira para pejabat juga kurang nyaman. Tentu, negara ini juga sedikit kurang mantap untuk dilaksanakan secara tertib dan aman sebagai tugas utama berpemerintahan.

Yang kedua, Pak Prof Yudian. Memang ini tantangan kita, Pak. Beban BPIP ini, menurut saya, saya pun setuju kalau ditingkatkan posisinya dengan undang-undang. Dan coba mulai dikaji, Pak Prof, mulai dipikirkan penataran berjenjang itu coba dilihat kembali. Karena tantangan menghadapi ke depan ini, tantangannya berat sekali dengan alur hampir tak ada batas dengan globalisasi. *Double digit* barangkali, apa pun yang terjadi.

Ini saya kira tantangan BPIP ini sebagai ideologi negara begitu pentingnya, Pak Prof. Sehingga, tidak sekedar lembaga ini membuat kurikulum dan lepas. Tidak sekedar, apa namanya, mengkaji-mengkaji lalu hasil kajian itu berbentuk kertas yang tidak bermakna. Kalau bisa diturunkan ke bawah berjenjang lagi.

Dan yang paling mendasar sekarang 60% Pak, *Gen Z. It's amazing*, dalam bahasa Inggris. Komposisi penduduk kita *Gen Z* yang mereka ini sebetulnya ideologinya adalah *tiktok*, ideologinya adalah *facebook*. Yang hampir setiap hari dengan notifikasi yang begitu hebat. Hampir empat jam rata-rata orang Indonesia menghabiskan waktu di *tiktok*. Sementara, kewajiban agamanya hampir tidak lagi dilihat oleh anak-anak kita. Saya kira, kita sadari ini semua. Juga menyangkut mala, nilai-nilai ideologi negara hampir tidak pernah mereka lihat. Yang ada adalah senyum-senyum karena *tiktok*.

Betapa kita bayangkan generasi ke depan seperti apa kalau BPIP lemah. Hampir saya tidak bisa membayangkan. Apakah negara ini masih ada 30 tahun kemudian? Saya kira sudah banyak sejarah-sejarah. Bagaimana Yugoslavia tinggal kenangan. Intinya adalah kalau ideologi negara sudah tidak diajarkan kembali dan tidak secara masif, maka sebuah bangsa bisa hilang.

Oleh karenanya, Pak Prof, sekali lagi *again*, saya minta untuk coba dikaji kembali. Coba berikan pandangan kepada pemerintahan ke depan. Kalau bisa kita naikkan posisinya menjadi setingkat Menteri. Bila perlu. Karena kita perkuat dengan posisi undang-undang. Bahkan sebuah lembaga hampir sama dengan lembaga negara yang lain.

Saya kira itu, Pak. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Insinyur Hugua dari Fraksi PDIP.

Berikut walaupun tidak *nunjuk* tangan, saya tahu Ibu Rezka ini pasti mau bertanya. Betul kan?

Ya. Silakan, Rezka dari Fraksi Demokrat.

F-P.DEMOKRAT (REZKA OKTOBERIA, S.H.):

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Pancasila!

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi II, beserta
Bapak/Ibu Anggota Komisi II, selanjutnya
Para Mitra dari Setneg, Setkab, KSP, dan BPIP,**

Pertama sekali saya apresiasi untuk empat lembaga kementerian kita dengan capaian dan juga prestasi, *output*, ataupun kinerja selama ini.

Saya tipis-tipis saja Pimpinan, tidak terlalu banyak.

Hanya menjadi tanda tanya saya sedikit untuk Setneg. Saya melihat di sini, di paparan ataupun di kertas yang diberikan kepada kami, ada target PNBP tahun anggaran dari 2023 ataupun 2024. Pertanyaan saya, PNBP lainnya ini apa saja ya, Pak? Mungkin nanti bisa tolong disampaikan.

Dan yang kedua, saya ini pencinta sepak bola. *Nah*, saya yakin di sini Bapak/Ibu dan masyarakat Indonesia saat ini sangat cinta terhadap Timnas kita Indonesia, tim bola. Saya bukan pemain, Pak. Tapi, saya pencinta olahraga sepak bola.

PPK Gelora Bung Karno, saya mau bertanya, Pak. Ini untuk *cost* atau biaya sewa dari kita untuk Timnas kita bertanding secara resmi, itu anggarannya atau biaya berapa ya, Pak?

Karena, kenapa tiket untuk *nonton* bola Timnas kita di GBK itu harganya sangat mahal? *Nah*, saya *pengen* tahu ini Pak, berapa anggaran atau biayanya GBK untuk digunakan oleh Timnas kita bermain, bertanding secara resmi. Itu untuk Setneg.

Berikut satu lagi untuk KSP, Pak Jenderal. Saya pernah mendengar bahwa ada program "KSP Mendengar". Bahkan pernah ke Dapil saya di Sumatera Barat, Pak Jenderal. Tapi, kami enggak diinfo *nih*, Pak. Padahal, saya *nunggu-nunggu nih*. Mana tahu saya diajak *nih* oleh Mitra KSP untuk bisa kita bersama. *Nah*, jadi program "KSP Mendengar" ini Pak, sekarang apakah masih ada Pak? *Nah*, jika masih ada Pak, apakah ini *muter* Pak, di seluruh Provinsi kita atau *random*? *Nah*, saya *pengen* tahu *nih*, Pak.

Dan apakah ada koordinasi atau pembahasan bersama antara KSP dengan lembaga kementerian lainnya yang terkait di dalam laporan ataupun masukan dari kegiatan KSP Mendengar kita yang disampaikan oleh masyarakat? Apakah setelah menampung dari masyarakat itu, KSP melakukan sinergi kolaborasi atau koordinasi dengan lembaga atau kementerian lainnya yang terkait?

Nah, ini mungkin kita *pengen* tahu, Pak. Supaya, kegiatan "KSP Mendengar" ini makin produktif dan optimal di lapangan. Apalagi bisa bersinergi dengan kami, mitra Bapak di Komisi II.

Terima kasih, Jenderal.

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Bu Rezka.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Tadi disinggung-singgung soal bola kaki. Mari kita berdoa bersama agar sore ini kita, Timnas Indonesia bisa menang melawan Filipina.

ANGGOTA RAPAT:

Aamiin.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Dan bila bilamana kita menang, kita akan masuk ke babak berikutnya untuk penyisihan Piala Dunia. Bisa kita bayangkan, alangkah enaknnya *nonton* Piala Dunia bilamana ada Tim Nasional Indonesia bermain di dalam itu. Luar biasa.

Berikut kami silakan terakhir, Pak Riswan Tony dari Fraksi Golkar.

F-PKB (QUMI HUSNUNIYATI, S.Aq., MA.):

Daftar satu, Bapak, barangkali. Ya, dari PKB.

F-P.GOLKAR (Drs. H. RISWAN TONY, DK):

Terima kasih, Ketua.

**Teman-teman Komisi II yang saya hormati,
Pak Mensetkab sahabat saya ini Mas Pram, juga
Mensesneg yang mewakili,
Pak Moeldoko, lalu
Profesor,**

Sudah lama kita enggak ketemu, saya fase bicara, Pak. Kenalkan, nama saya Riswan Tony. Khususnya Pak Moeldoko, baru ini bertatap muka walaupun kita sebagai partner atau teman kerja di DPR RI.

Saya tidak bisa apa saya tidak berbicara pagu karena ini sudah, sudah *given* Pak, ya. Tapi, tentang koordinasi, Pak. Apakah pagu yang sekarang ini dibicarakan sudah berkoordinasi dengan tim transisi, khususnya KSP dan BPIP, ya?

Kalau Setneg dan Setkab mungkin tetap berjalan, walaupun orangnya nanti berbeda. Begitu ya. Karena kita sama-sama akan berakhir ini, Pak. Beda 20 hari saja. *Nah*, koordinasi ini tentunya diperlukan karena apa? Kerja-kerja Presiden di depan.

Saran saya, walaupun ini agak terlambat karena kita juga baru bertemu, banyak sekali di kabinet ini kurang sinkron antara Presiden dan pembantu-pembantunya terhadap komitmen atau komentar-komentar yang ada di tempat umum, Pak.

Sebagai contoh yang terakhir sebagai, karena ini mitra kami juga di OIKN Pak, khususnya Pak Moeldoko. Itu kan banyak sekali Menteri mengatakan, "Oh, ini tinggal dieksekusi saja." Terlambat, plin-plan, dan sebagainya, Pak. Tapi, kenyataannya kemarin kami bicara pagu untuk OIKN, munculnya tetap 500 miliar, Pak. Itu buat operasional dan bayar gaji saja, Pak. Padahal, ada pagu yang sudah disepakati 29,8. Itu yang sudah dari dua tahun, yang, dua tahun yang lalu Pak, tidak pernah terealisasi.

Bagaimana mereka mau eksekusi terhadap tanah kalau uangnya enggak ada, Pak? Tapi, *kok* beberapa Menteri ngomongnya enak, "Ini tinggal eksekusi saja." Kenapa *kok* jadi plin-plan dan sebagainya begitu, Pak?

Lah ini kan, Pak Bambang ini kan orang Jawa yang santun, Pak. Jadi, dia enggak bisa ngomong yang terlalu *konfrontir*-lah. Ya, enggak ada duit, apa yang mau dieksekusi, Pak?

Nah, terakhir munculnya 500 miliar lagi. Belum lagi kemarin Pak Presiden mengatakan bahwa harga di situ 400.000,00-800.000,00. Ini kan masukan yang sebenarnya menjerumuskan Presiden juga, Pak. Karena di situ enggak sebesar itu, Pak. Itu kan pagunya pemerintah terhadap pembebasan yang menurut saya itu sudah merangkap semua.

Ini bahaya, Pak. Karena untuk investor, khususnya perumahan, dengan angka 400, 900, itu sudah enggak masuk, Pak. Mau jual bagaimana lagi? Belum lagi kontur yang begitu berat. Jadi, memang enak ngomong, "Ini mumpung belum mahal, sekian."

Ya, investor langsung, ini teman-teman saya di Ray, ya *mikir* juga akan membuat rumah di sana dengan harga 800.000,00. Itu kan. Sedangkan, kita bicara Jabotabek saja mereka masih mencari rumah mencari tanah antara 200.000,00-300.000,00 dengan konsumen yang menurut saya, yaitu sudah ada di depan mata. Begitu.

Nah, hal-hal seperti ini sinkronisasi ini harus adalah. Terutama juga, di Mensesneg juga, masukan-masukan terhadap Presiden itu harus hati-hati tidak boleh sembarangan, karena akan berdampak luas sekali.

Nah, khusus Setneg terhadap status Hotel Sultan, itu kan ada dua spanduk yang bertahan, sama-sama bertahan *tuh*. Ada SHM 26 dan sebagainya itu, Pak. Ini sebaiknya Pak dikoordinasikan atau dirundingkan karena di situ kan ada hotel yang masih operasional. Kan enggak mungkin kita sita langsung tutup, Pak. Itu mubazir juga karena hotel ini sangat, ya, favorit. Kami saja, DPR, sering sekali memakai di situ Pak. Selain tempatnya dekat dan juga lebih gampang mobilisasinya.

Nah, bagaimana *win-win solution*-nya, Pak? Selama peralihan penyitaan ini, pendapatan daripada hotel itu apakah nanti dibagi dua atau bagaimana? Sehingga, pihak Setneg atau pihak negara juga mendapat masukan. Tapi, pihak hotel juga tidak dirugikan, Pak. Sehingga, keraguan-keraguan terhadap konsumen untuk memakai hotel ini ya, tetap berjalan. Ya, seperti kita ketahui yang sudah jelas kalau PSSI pasti markasnya disitu, Pak. Tamunya pun pasti di situ. *Nah*, bagaimana kita memperbaiki hotel yang sudah mangkrak beberapa tahun yang di depan itu, itu lebih baik. Daripada kita sita, jadi candi di situ. Tidak mengeluarkan satu *win-win solution*, Pak.

Nah, pertanyaan ini juga yang berikutnya bagaimana status dengan Hotel Mulia, Lapangan Tembak, *Sency*, dan PS? Ini kan enggak pernah dibahas Pak di kita. Apakah masih sewanya bayar atau bagaimana? Dan

beberapa apartemen yang Jepang ini juga status tanahnya bagaimana? Karena yang saya tahu, kalau FX itu kan memang masih status tanah negara. Tapi, itu kan, kita beli apartemen di situ kan cuma beli bangunannya saja.

Nah, hal-hal seperti harus dijelaskan, Pak. Karena, PNBP Bapak dari tahun ke tahun ya, *segitu-segitu* saja begitu. Padahal, kegiatan itu kan bisa berkurang bisa berlebih begitu. Artinya, banyak sekali kegiatan-kegiatan di GBK ini. Khususnya, yang harian dan per-mingguan itu banyak sekali, Pak. Jadi, menurut saya ini terlalu kecil, Pak. Kalau tidak mencapai angka 1 triliun itu, ini banyak kebocorannya ini. Pasti ini, Pak Setneg.

Terakhir, untuk BPIP, Pak. Saya juga enggak tahu nanti Presiden yang berikut ini, apakah tetap bertahan dengan lembaga ini atau bagaimana. Tapi yang sudah jelas, mestinya BPIP ini seperti yang dikatakan oleh Pak Amin tadi harusnya melalui satu undang-undang dan menjadi lagi mata pelajaran wajiblah begitu, Pak. Atau BP7 yang dulu itu kita wajibkan. Sekarang kan BPIP ini kan seperti kayak elite saja. Elite yang di atas saja Pak, yang menikmati. Tapi anak-anak SD sampai SMA itu mereka enggak *ngerti*, Pak. Kalau kita tanya hafal Pancasila saja sudah bagus di daerah-daerah itu. *Nah*, ini harus dikaji ulanglah, Pak.

Saya rasa itu saja, Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Semoga ini terakhir, Ibu Qumi Husnuniyati. Walaupun ini sudah berkali kali saya bilang tadi dari Pak Amin, terakhir, terakhir. Tapi, ini betul-betul terakhir.

Silakan, Bu.

F-PKB (QUMI HUSNUNIYATI, S.Aq., MA.):

Terakhir ini, Pak. Terima kasih, Pimpinan.

**Ketua Komisi II dan Anggota Komisi II,
Yang saya hormati mitra dari unsur baik Setneg, maupun Setkab, dan BPIP,**

Untuk paparan yang sudah disampaikan, saya ingin fokus kepada Mensetneg, kepada Setneg terkait dengan tambahan anggaran di tahun 2024. Tadi di halaman 10 pada paparan sambutan disebutkan Mensetneg mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp14.498.720.000,00 yang

dialokasikan untuk kegiatan percepatan pencegahan *stunting* tahun 2024. Pertanyaannya:

- Apa bentuk kegiatan pencegahan *stunting* yang dilakukan oleh Mensetneg?
- Apakah kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan kegiatan yang ada di Kementerian Kesehatan dan BKKBN?
- Apa urgensi dan dasar hukumnya sehingga Kementerian Sekretaris Negara juga ikut mengurus *stunting*? Bukankah itu ranahnya Kementerian dan Lembaga negara yang lebih bersifat teknis?

Itu barangkali pertanyaan yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Terima kasih Ibu Qumi.

Dan itu betul-betul adalah sebagai penyampaian pendalaman terakhir ya, untuk kita semua pada pertemuan pembahasan anggaran kita pada hari ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Tentunya Pak Menteri Setkab, dan dari Kemensetneg, dan KSP Pak Moel, dan Profesor Pak Yudian Wahyu.

Bapak/Ibu sekalian yang berbahagia,

Pada pertemuan kita kali ini, kita tidak mengambil keputusan. Hanya mendengarkan penyampaian dan pendalaman akan kita lakukan pada Rapat Dengar Pendapat yang akan kita lakukan pada tanggal 23 September dalam bentuk pertemuan konsinyering. Di situ kita dalamkan, termasuk juga kita akan mendalami dan memberikan persetujuan pada usulan penambahan anggaran. *Insyallah*, itu.

Oleh karena itu, izinkan kami kita bacakan kesimpulannya saja pada hari ini. Dan ini tidak perlu diresdai karena restu/tidak restu, tetap kita akan bahas ini pada pertemuan berikutnya.

Dan tadi ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan para Anggota dalam bentuk pendalaman anggaran. Mohon berkenan kiranya dari Kementerian dan Lembaga dapat memberikan jawaban tertulis kepada kami. Apa setuju begitu Pak, ya? Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Jadi, kita bisa persingkat pertemuan kita ini. Paling lambat 12.30 menit sudah selesai.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Perkenankan kami membacakan hal sebagai berikut.

Kesimpulan Rapat Kerja Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Di layar, operator. Silakan, operator, di layar.

Saya kira kita bacakan saja untuk menghemat waktu sambil berjalan nanti dia apa kan.

Tolong ya, Pak Abrar, ya.

F-PDIP (Drs. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Izin, Pimpinan. Mungkin kalau boleh usul sambil menunggu paparan kesimpulan. Kan ada hal-hal yang barangkali bisa direspons oleh beliau-beliau yang di luar anggaran. Sambil menunggu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Terima kasih, Pak Heru.

Saya kira kita bacakan saja, ya.

F-PDIP (RIYANTA, S.H.):

Pimpinan, kalau belum siap, mohon izin satu menit saja.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Ya, boleh.

Silakan.

F-PDIP (RIYANTA, S.H.):

Terima kasih.

Ini saya sampaikan kepada Pak Moeldoko selaku KSP. Mohon disampaikan kepada Bapak Presiden, bahwa saat ini kondisi petani secara umumnya kesulitan pupuk. Kemudian, kawan-kawan pengusaha yang ingin berkreasi untuk, apa, membuat pupuk organik dan mengajukan permohonan di

Kementan itu kesulitan untuk memperoleh izin. Jadi, oleh karena itu, yang berkaitan dengan PNB Perizinan itu agar di-nol-kan.

Kemudian juga perizinan yang berkaitan dengan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan diambil alih oleh nasional. Ini banyak perizinan dari daerah itu yang sampai saat ini belum *clear*. Mohon itu direkonstruksikan kembali. Kalau perlu, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk dimaksimalkan.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M./F-PG):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Riyanta.

Baik.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Izinkan kami langsung bacakan.

Kesimpulan Rapat, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Selasa, 11 Juni tahun 2024.

1. Komisi II DPR RI telah menerima penjelasan dari Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai berikut:
 - a. Dari Kementerian Sekretaris Negara :
 - Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp4.490.447.063.630,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp4.614.692.290.000,00 atau realisasi sebesar 97,31%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran Kantor Staf Presiden sebesar Rp118.995.278.243,00 dari pagu alokasi anggaran KSP tahun 2023 sebesar Rp120.704.012.000,00 atau sebesar 98,58%; kemudian
 - Realisasi APBN tahun 2024 sampai dengan 3 Juni tahun 2024 sebesar Rp963.302.523.718,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp3.025.453.990.000,00 atau sebesar atau realisasi sebesar 31,84%. Realisasi anggaran tersebut sudah termasuk realisasi anggaran Kantor Staf Presiden sebesar Rp41.950.233.610,00 dari pagu alokasi anggaran KSP tahun 2024 sebesar Rp174.266.368.000 atau sebesar 35,77%;

- Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp2.472.916.534,00 sudah termasuk pagu indikatif Kantor Staf Presiden tahun 2025 sebesar Rp118.378.119.000,00; kemudian
 - Usulan pergeseran anggaran antar program pada pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp363.373.989.000,00 dan ini akan dibahas pada saat RDP yang akan datang.
- b. Kemudian dari Kementerian Sekretaris Kabinet:
- Realisasi APBN tahun 2023 sebesar Rp350.831.451.401,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp356.605.412.000,00 atau realisasi sebesar 98,38%; kemudian
 - Realisasi APBN tahun 2024 sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 sebesar Rp189.365.944.216,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp424.390.095.000 atau realisasi sebesar 44,62%;
 - Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp428.000.946.313, kami ulangi, Rp428.946.313.000,00;
 - Usulan penggeseran anggaran antar program pada pagu indikatif RAPBN tahun 2025 sebesar Rp11.467.083.000,00 kemudian; Usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp164.310.895.000,00.

Dan terakhir,

- c. BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila):
- Realisasi APBN tahun 2023 Rp335.364.672.060,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp347.841.015.000 atau realisasi sebesar 96,41%;
 - Realisasi APBN tahun 2024 sampai dengan 3 Juni tahun 2024 sebesar Rp180.214.285.137,00 dari pagu alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp313.669.821.000,00 atau realisasi sebesar 57,45%;
 - Pagu indikatif RAPBN tahun 2025 BPIP sebesar Rp299.428.347.000,00;
 - Usulan tambahan anggaran tahun 2025 BPIP sebesar Rp100.000.000.000,00.

Demikian.

Komisi II DPR RI meminta kepada Sekretaris, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Sekretaris Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk segera menyampaikan alokasi anggaran tahun 2023 dan alokasi anggaran tahun 2024 beserta rinciannya sesuai dengan jenis belanja dan kegiatan satuan tiga serta target dan capaian kinerja kepada Sekretariat Komisi II DPR RI, sebagai bahan pendukung untuk Rapat Pembahasan RAPBN tahun 2025, awal bulan September yang akan datang.

Demikian.

Nanti akan ditandatangani Sekretaris Kementerian Sekretaris Negara, Setya Utama, kemudian Sekretaris Kabinet Bapak Pramono Anung dan Staf Kepresidenan Pak Moeldoko, serta dari BPIP Pak Yudian Wahyu, dan dari Komisi II Syamsurizal.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Barangkali inilah hasil pertemuan kita pada hari ini. Sebagai kami katakan tadi, kita akan selesai dan tutup pada pukul 12.30 menit.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Kami sebelumnya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Kabinet Republik Indonesia yang tadi sudah kita rayakan sepintas ulang tahun beliau yang ke sekian, dan kepada Kementerian Sekretaris Negara dan Bapak Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan dan Profesor Bapak Yudian Kepala BPIP, dan Bapak Anggota yang kami banggakan dari Komisi II, serta hadirin hadirat yang berbahagia.

Selanjutnya dengan mengucapkan *alhamdulillah rabbil alamin, insya Allah* kita bertemu pada pembahasan berikutnya pada awal bulan September tahun 2024.

Terima kasih atas perhatian kita bersama. Semoga Allah SWT meridai kita semua.

Billahi taufik wal hidayah.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.33 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II DPR RI



Dahliya Bahnan, S.H., M.H.
197504202002122002